Wali Kota Malang Minta Linmas Ikut Tangkal Radikalisme

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Malang - Wali Kota Malang Sutiaji meminta anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menangkal radikalisme, terutama memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, pada tahun-tahun politik menjelang pemilu, rawan penyebaran radikalisme. Hal itu dikatakan Sutiajidi Kantor Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada Rabu (16/11/2022).

Sutiaji mengatakan, perkembangan teknologi informasi (TI), terutama adanya media sosial semakin mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan falsafah negara Indonesia.

Sehingga, peran Linmas sebagai pelindung masyarakat diharapkan turut membantu menangkal radikalisme. Namun terlebih dahulu, seluruh <u>personel</u> <u>Linmas</u> mesti teredukasi bahaya radikalisme.

"Linmas harapannya juga teredukasi, juga diberikan literasi terkait masalah paham-paham radikalisasi di wilayah, termasuk konflik sosial, mudah terhasut, ada berita hoaks, ada berita yang sesungguhnya tidak benar," kata Sutiaji saat diwawancarai pada Rabu (16/11/2022).

"Sehingga Linmas diberikan pemahaman, yang memberikan materi dari TNI, Polri dan kami, harapannya dapat terbekali, edukasi pesan-<u>pesan moral</u>," tambahnya.

Menurutnya, seluruh wilayah di Kota Malang harus terus dalam pengawasan untuk menangkal tumbuhnya radikalisme.

"Perlu waspada di manapun, ya contoh saja kan pernah di Bumiayu (teroris) malahan, tempatnya justru yang tempat-tempat yang tidak banyak ini, yang ini yang harus diwaspadai, karena tidak menutup kemungkinan justru mereka tumbuh subur," katanya.

"Ingat dulu ya malah justru di wilayah kedungkandang yang lepas dari perhatian kita, nah maka saya kira ini tidak bisa diklasifikasi daerah rawan dan tidak rawan, hanya semuanya harus waspada," tambahnya.

Sutiaji mengungkapkan, jelang tahun politik rawan terjadinya penyebaran radikalisme. Dia mengimbau kepada para Linmas bila mendapati hal-hal yang mencurigai dapat langsung melapor ke Kepolisian atau TNI untuk ditindaklanjuti.

"Ini kan menjelang tahun-tahun politik, karena ada masa-masa transisi, ini khawatir ada goncangan-goncangan," katanya.